

# Menakar Demokrasi Pasca Pemilu: Refleksi Kritis Terhadap Partisipasi, Transparansi, Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia

Yanuar Rikardo <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1</sup> [yanuarrikardo@unived.ac.id](mailto:yanuarrikardo@unived.ac.id)

## ARTICLE HISTORY

Received [24 Juni 2023]

Revised [26 Juli 2023]

Accepted [29 Juli 2023]

## KEYWORDS

Democracy, Post-Election, Public Participation, Political Consolidation, Civic Education

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis proses demokrasi pasca pemilu, khususnya dalam konteks partisipasi publik, transparansi penyelenggaraan, dan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bertempat di RRI Bengkulu, kegiatan ini mengusung format diskusi interaktif yang melibatkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi media, mahasiswa, serta masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemilih relatif tinggi, tantangan besar masih ditemukan dalam aspek penguatan oposisi, keterlibatan masyarakat sipil, dan penetrasi oligarki dalam sistem politik. Selain itu, praktik politik transaksional dan penyebaran hoaks masih menjadi hambatan nyata bagi demokrasi yang sehat. Melalui metode siaran langsung dan pemanfaatan media sosial, kegiatan ini mampu menjangkau audiens yang luas dan mendorong kesadaran politik kolektif. Evaluasi pasca acara menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan publik dan perlunya pendidikan politik berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pengabdian yang tidak hanya reaktif terhadap isu kontemporer, tetapi juga proaktif dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab secara demokratis.

## ABSTRACT

*This community service activity aims to critically evaluate the post-election democratic process in Indonesia, particularly in terms of public participation, electoral transparency, and the challenges of democratic consolidation. Conducted at RRI Bengkulu, the program featured an interactive dialogue involving academics, media professionals, students, and the general public. The findings indicate that while voter turnout was relatively high, major challenges persist—especially in reinforcing the role of the opposition, empowering civil society, and resisting oligarchic control in politics. Transactional politics and misinformation campaigns remain significant obstacles to a healthy democracy. Utilizing live broadcasts and social media platforms, this initiative successfully reached a broad audience and fostered collective political awareness. Post-event evaluations revealed improved public understanding of the importance of civic oversight and the need for continuous political education. This program serves as a model for community engagement that not only responds to contemporary issues but also proactively shapes responsible, critically minded democratic citizens.*

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu berperan sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan dan menyusun kebijakan publik (Isabela, 2022). Namun demikian, demokrasi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu; lebih dari itu, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi publik berkelanjutan, akuntabilitas pemerintahan, serta penguatan institusi yang inklusif dan responsif. Pasca pemilu, administrasi publik di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan demokrasi substantif. Keterlibatan warga negara sering kali terbatas pada tahap elektoral semata. Setelah pemilu usai, partisipasi masyarakat cenderung menurun drastis, terutama dalam hal pengawasan terhadap kebijakan, transparansi anggaran, dan kinerja pemerintah terpilih. Ketidakterlibatan ini menciptakan ruang kosong yang rentan diisi oleh praktik kekuasaan yang tidak akuntabel (Kaesmetan, 2019).

Salah satu gejala yang mencemaskan adalah melemahnya peran oposisi dalam sistem politik. Kooptasi terhadap partai-partai yang sebelumnya bersikap kritis menyebabkan hilangnya mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini merupakan ancaman terhadap prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan (LIPI, 2020). Ketika pengawasan melemah, efisiensi dan efektivitas kebijakan pun terancam. Masalah lainnya adalah meningkatnya praktik politik transaksional, terutama dalam masa kampanye dan pembentukan koalisi pemerintahan. Politik transaksional tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga mempengaruhi distribusi sumber daya dan pelayanan publik. Praktik ini menghasilkan birokrasi yang lebih loyal kepada elite politik dibandingkan kepada kepentingan publik (Sanusi, 2015).

Polarisasi politik yang tajam menjadi tantangan serius bagi administrasi pemerintahan pasca pemilu. Polarisasi yang berakar dari sentimen ideologi dan identitas sosial berpotensi menciptakan fragmentasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Bagi aparatur publik, kondisi ini menambah beban dalam upaya menjaga netralitas, stabilitas, serta pelayanan yang berkeadilan (Benninga, Berkowitz, & Kuehn, 2003).

Selain itu, peran serta masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan masih sangat terbatas. Seringkali masyarakat tidak dilibatkan secara substansial dalam forum musyawarah atau perencanaan pembangunan daerah. Padahal, partisipasi warga yang aktif merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Boaden, 2006).

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik dan kebijakan publik di kalangan masyarakat. Banyak warga belum memahami peran strategis mereka dalam mengawal jalannya pemerintahan. Akibatnya, ruang partisipasi yang disediakan pemerintah tidak termanfaatkan secara optimal (Budiningsih, 2008).

Beberapa inisiatif pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebelumnya berfokus pada peningkatan kapasitas warga melalui pelatihan advokasi kebijakan, forum warga, dan dialog publik. Hasilnya cukup signifikan dalam membangun kesadaran warga, namun jangkauannya masih terbatas dan tidak semua daerah memiliki akses terhadap inisiatif serupa (Ifadah, 2018).

Selain itu, belum banyak kegiatan yang secara khusus membahas konsolidasi demokrasi dari sudut pandang administrasi publik pasca pemilu. Sebagian besar kegiatan lebih bersifat politis atau seremonial, tanpa menyentuh aspek teknokratis seperti evaluasi kebijakan, reformasi birokrasi, atau pemantauan pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah terpilih.

Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan semestinya menjadi solusi. E-participation, e-audit, dan platform monitoring kebijakan merupakan bentuk teknologi tepat guna yang belum banyak diterapkan dalam konteks pengawasan demokrasi pasca pemilu. Padahal, hal tersebut dapat memperkuat transparansi dan memperluas partisipasi publik (Isabela, 2022).

Dalam konteks ini, perlu adanya pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang menasar tidak hanya pada aspek elektoral, tetapi juga pasca elektoral, terutama terkait tata kelola pemerintahan. Evaluasi demokrasi harus mencakup sejauh mana pemerintah terpilih menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan. Melalui kegiatan pengabdian bertajuk "*Menakar Demokrasi Pasca Pemilu*", Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu berupaya mendorong diskursus publik mengenai praktik tata kelola pasca pemilu. Kegiatan ini dirancang sebagai dialog interaktif melalui media RRI Bengkulu, yang memungkinkan masyarakat luas turut serta memberikan perspektif, kritik, dan harapan terhadap demokrasi ke depan.

Model diskusi terbuka dipilih sebagai strategi pelaksanaan kegiatan untuk merangkul beragam perspektif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini belum memiliki akses terhadap ruang dialog akademik. Kegiatan ini dirancang sebagai media pembelajaran bersama yang bersifat inklusif dan partisipatif, dengan harapan dapat mendorong terbentuknya kesadaran publik terhadap pentingnya kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Adapun tujuan inti dari kegiatan ini adalah menyediakan wadah reflektif bagi masyarakat guna mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan pasca pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat literasi politik warga, menumbuhkan pemahaman kritis terhadap arah kebijakan, serta membentuk karakter warga negara yang berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui pendekatan Administrasi Publik, kegiatan ini memosisikan demokrasi bukan semata sebagai proses elektoral, melainkan sebagai bagian dari tata kelola pelayanan publik yang menuntut adanya efektivitas, efisiensi, dan prinsip keadilan dalam pengelolaan kepentingan bersama.

## METODE

Untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat dalam mengevaluasi praktik demokrasi pasca pemilu dan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, kegiatan ini dirancang melalui serangkaian tahapan sistematis yang terintegrasi dalam satu alur kerja strategis. Kegiatan dimulai dengan tahap **persiapan**, yang mencakup identifikasi masalah utama dalam praktik demokrasi pasca pemilu, penyusunan tema kegiatan, dan penentuan narasumber yang relevan. Pada tahap ini, tim pelaksana menyusun materi diskusi, menentukan format kegiatan, serta menjalin komunikasi awal dengan pihak mitra, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu, sebagai media pelaksana dialog interaktif.

Tahap berikutnya adalah penyusunan struktur kerja dan logistik teknis. Tim pengabdian menyusun jadwal kegiatan, membuat naskah acara, serta menyiapkan perangkat teknis yang dibutuhkan untuk siaran langsung, baik melalui gelombang radio maupun media sosial. Aktivitas ini mencakup koordinasi dengan tim produksi RRI, briefing kepada narasumber dan moderator, serta pengujian peralatan siaran guna memastikan kelancaran pelaksanaan.

Selanjutnya, dilakukan tahap pelaksanaan kegiatan, yaitu penyelenggaraan diskusi interaktif dengan melibatkan berbagai unsur—termasuk dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan publik pendengar RRI. Diskusi ini mengangkat tema “*Menakar Demokrasi Pasca Pemilu*” dan dirancang untuk memantik dialog kritis serta menyampaikan informasi edukatif seputar evaluasi pemilu, penguatan partisipasi, serta peran masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Narasumber utama memberikan pemaparan singkat yang kemudian diikuti sesi tanya jawab, baik secara langsung dari peserta maupun melalui kanal interaktif seperti media sosial dan sambungan telepon.

Setelah kegiatan utama, tim melanjutkan ke tahap evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan menilai respons peserta, kualitas interaksi publik, serta efektivitas penyampaian materi. Kegiatan ini diarsipkan dalam bentuk dokumentasi audio visual, transkrip diskusi, dan laporan naratif, yang kemudian digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan program pengabdian selanjutnya.

Melalui rangkaian tahapan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat, meningkatkan literasi kebijakan publik, dan mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Strategi ini dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola publik yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan sebagaimana ditekankan dalam perspektif Administrasi Publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Aktivitas

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Menakar Demokrasi Pasca Pemilu*” yang dilaksanakan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu menghasilkan sejumlah luaran yang sejalan dengan tujuan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui siaran langsung di Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu, dan diformat sebagai diskusi terbuka yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, penyiar radio, serta masyarakat umum sebagai pendengar dan peserta interaktif. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari berbagai pihak yang terlibat.

Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah terbentuknya ruang diskusi publik yang inklusif, yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan kritik terkait pelaksanaan demokrasi pasca pemilu. Diskusi yang berlangsung tidak hanya bersifat satu arah, tetapi memberikan kesempatan kepada pendengar untuk menghubungi narasumber secara langsung melalui telepon atau menyampaikan pertanyaan melalui media sosial. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan interaktif berhasil menciptakan keterlibatan yang lebih luas dalam membahas isu-isu publik.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup evaluasi pemilu, peran oposisi dalam demokrasi, partisipasi masyarakat, politik transaksional, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan observasi dan catatan tim pelaksana, peserta menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap tema yang dibahas. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, komentar yang disampaikan melalui kanal interaktif, serta kesediaan peserta untuk membagikan pandangan dan pengalaman pribadi mereka terkait pelaksanaan demokrasi di daerah masing-masing.

Hasil lainnya adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep dasar dalam administrasi publik pasca pemilu. Melalui pemaparan dan diskusi, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya akuntabilitas pemerintah terpilih, mekanisme pengawasan publik, dan perlunya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam evaluasi internal, sebagian peserta menyampaikan bahwa mereka sebelumnya belum memahami secara utuh hak dan peran mereka dalam sistem demokrasi.

Dari sisi teknis pelaksanaan, kegiatan ini berhasil memanfaatkan media siaran sebagai alat edukasi publik yang efektif. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan media publik seperti RRI membuka peluang baru untuk menyebarkan wacana kritis kepada masyarakat luas, khususnya kelompok yang selama ini tidak terjangkau oleh pendidikan politik konvensional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi dalam metode pengabdian dapat menghasilkan capaian yang lebih strategis dan berdampak jangka panjang.

Selain hasil dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan partisipasi, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jejaring sosial antara institusi akademik, media, dan masyarakat sipil. Melalui keterlibatan bersama dalam diskusi, tercipta komunikasi lintas sektor yang memungkinkan adanya tindak lanjut dalam bentuk program literasi politik, forum warga, atau pelatihan berbasis komunitas. Ini menjadi langkah awal bagi penguatan tata kelola demokrasi yang partisipatif dan berbasis lokal.

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini juga menghasilkan dampak positif dalam konteks pendidikan karakter dan pembentukan kepekaan sosial. Mahasiswa tidak hanya terlibat sebagai peserta,

tetapi juga sebagai bagian dari tim pelaksana, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, publikasi, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan. Hal ini memberikan pengalaman praktis dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke ruang publik yang nyata. Kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memahami dan mengawal demokrasi. Salah satu temuan penting adalah masih kuatnya budaya apatis di kalangan warga, terutama setelah pemilu selesai. Banyak peserta menyatakan bahwa mereka merasa tidak memiliki saluran untuk menyuarakan pendapat atau mengawasi kinerja pejabat publik. Diskusi ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat keterlibatan warga dalam pemerintahan lokal.

Dari sisi keluaran, kegiatan ini berhasil menghasilkan dokumentasi audiovisual yang berpotensi dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi dalam diskusi publik lanjutan. Tim pelaksana juga telah menyusun laporan naratif yang merangkum dinamika jalannya diskusi, tanggapan masyarakat, serta refleksi kritis dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut dirancang sebagai luaran resmi dalam bentuk publikasi pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi representasi konkret atas kontribusi institusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan demokrasi berbasis partisipasi komunitas. Secara umum, pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata dalam menjembatani wacana demokrasi dengan masyarakat luas. Melalui pendekatan Administrasi Publik, peningkatan literasi demokrasi tidak semata dipahami sebagai perluasan hak politik, tetapi lebih jauh diposisikan sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab. Keberhasilan kegiatan ini memberikan pijakan awal bagi pengembangan program serupa di wilayah lain, dengan penyesuaian konteks dan isu yang lebih spesifik sesuai kebutuhan lokal.

### **Penyelesaian Masalah**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema "*Menakar Demokrasi Pasca Pemilu*" menunjukkan peran strategis dalam menjawab persoalan rendahnya literasi politik dan minimnya ruang evaluatif publik terhadap jalannya pemerintahan setelah pemilu. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terciptanya forum dialog terbuka yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, dari akademisi, mahasiswa, praktisi media, hingga warga umum. Tingginya partisipasi audiens dalam sesi interaktif melalui saluran radio dan media sosial mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat akan ruang partisipasi yang inklusif dan responsif. Selain itu, munculnya kesadaran kritis dari peserta terhadap pentingnya pengawasan publik menjadi indikator lain bahwa kegiatan ini berhasil menyentuh akar persoalan.

Dari sisi kekuatan internal, tim pengabdian memiliki kapasitas yang kuat dalam merancang dan melaksanakan kegiatan berbasis media. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik menciptakan sinergi antara keilmuan dan praktik komunikasi publik. Kesiapan materi, pembagian tugas yang jelas, serta penggunaan pendekatan partisipatif menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan. Pengalaman tim dalam melakukan fasilitasi diskusi publik juga memudahkan proses adaptasi terhadap dinamika peserta dan jalannya dialog.

Kesempatan eksternal yang turut memperkuat keberhasilan kegiatan adalah dukungan dari mitra strategis, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu. RRI tidak hanya menyediakan sarana siar, tetapi juga membantu mempromosikan kegiatan kepada publik, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemanfaatan media penyiaran nasional menjadi peluang penting untuk memperluas dampak kegiatan, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh forum diskusi formal. Selain itu, tingginya perhatian publik terhadap isu pasca pemilu menjadi momentum yang tepat untuk mengangkat tema ini secara kritis dan edukatif.

Namun, di balik kekuatan tersebut, kegiatan ini juga menghadapi beberapa kelemahan internal yang perlu dicatat. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal dokumentasi teknis dan alat pendukung siaran. Beberapa kendala teknis seperti kualitas audio dan gangguan jaringan sempat menghambat kelancaran interaksi dengan audiens daring. Di samping itu, belum adanya pelatihan intensif bagi mahasiswa dalam bidang produksi siaran menjadi hambatan minor yang berdampak pada efisiensi teknis pelaksanaan.

Hambatan eksternal yang turut mempengaruhi jalannya kegiatan berasal dari variabel partisipasi publik yang tidak merata. Meskipun audiens cukup aktif, sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap pasif atau enggan terlibat dalam diskusi, terutama yang berkaitan dengan isu politik. Faktor ini bisa disebabkan oleh rendahnya literasi digital, kejenuhan terhadap wacana politik, atau ketidakpercayaan terhadap ruang diskusi sebagai instrumen perubahan. Selain itu, keterbatasan waktu siaran juga menjadi tantangan dalam mengeksplorasi topik-topik secara lebih mendalam dan komprehensif.

Meskipun berbagai tantangan muncul selama pelaksanaan, sinergi antara kekuatan internal tim pelaksana dan dukungan eksternal dari mitra mampu mengatasi sebagian besar hambatan yang dihadapi. Evaluasi dan refleksi pascakegiatan berperan sebagai instrumen pembelajaran yang relevan untuk merancang strategi keberlanjutan program ke depan. Dalam perspektif administrasi publik, kegiatan ini memperkuat unsur partisipasi dan transparansi—dua prinsip utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Capaian yang telah diraih menunjukkan efektivitas program ini dalam merespons isu-isu inti yang telah teridentifikasi sejak awal. Keberhasilan menciptakan ruang diskusi yang inklusif, penerapan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, serta kolaborasi strategis dengan media penyiaran menghadirkan model pengabdian yang layak direplikasi di wilayah lain, selama tetap mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan lokal masing-masing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “*Menakar Demokrasi Pasca Pemilu*” menunjukkan kontribusi signifikan dalam membangun ruang evaluatif yang mendorong partisipasi publik serta memperkuat literasi demokrasi dalam konteks administrasi publik. Hasil paling menonjol yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah adalah keberhasilan kegiatan ini dalam menghadirkan forum dialog terbuka yang mampu menjangkau masyarakat luas melalui media siaran. Ruang diskusi tersebut tidak hanya mempertemukan narasumber dan peserta secara interaktif, tetapi juga membentuk kesadaran kritis warga terhadap pentingnya pengawasan publik, transparansi pemerintahan, dan penguatan institusi demokrasi pasca pemilu.

Penyampaian materi yang relevan, penggunaan media komunikasi publik, serta keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen menjadi kombinasi kekuatan yang mampu menjawab permasalahan rendahnya partisipasi warga dalam pengawasan politik pasca pemilu. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa strategi kolaboratif antara institusi pendidikan dan media publik dapat menciptakan model edukasi demokrasi yang efektif, murah, dan inklusif. Dalam konteks administrasi publik, kegiatan ini turut memperkuat dimensi tata kelola yang responsif, partisipatif, dan berbasis komunitas.

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dan hambatan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan waktu siaran yang tidak memungkinkan pendalaman isu secara menyeluruh. Hambatan teknis seperti kualitas jaringan dan kurangnya pelatihan teknis bagi mahasiswa dalam produksi media juga perlu diatasi agar efektivitas penyampaian informasi semakin optimal. Partisipasi masyarakat juga belum merata, terutama dari kalangan yang belum terbiasa mengikuti diskusi berbasis siaran publik.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke dalam bentuk pelatihan komunitas, forum warga, atau penyusunan modul pendidikan politik berbasis lokal. Perlu juga dilakukan pelibatan yang lebih besar dari tokoh masyarakat dan organisasi sipil sebagai penguat jejaring. Penggunaan teknologi informasi dan media digital juga perlu ditingkatkan agar jangkauan penyebaran informasi lebih luas dan dapat menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya belum tersentuh.

Model pengabdian yang telah dilaksanakan ini memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan tema, media, dan metode yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Replikasi kegiatan harus memperhatikan keberlanjutan dan pendampingan pasca kegiatan, agar perubahan yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi bagian dari transformasi budaya demokrasi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benninga, J. S., Berkowitz, M. W., & Kuehn, P. (2003). *The relationship of character education implementation and academic achievement in elementary schools*. *Journal of Character Education*, 1(1), 1–20.
- Boaden, R. J. (2006). *Leadership development: Does it make a difference?* *Leadership & Organization Development Journal*, 27(1), 5–27. <https://doi.org/10.1108/01437730610646045>
- Budiningsih, A. (2008). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ifadah, N. (2018). *Spiritual Leadership: Belajar Kepemimpinan ala Pesantren*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Isabela, M. A. C. (2022). Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional>

- Kaesmetan, O. T. H. (2019). Studi Perilaku Pemilih pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. Dalam *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu* (Edisi I). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). *Laporan Kegiatan Pelatihan Pengawasan Partisipatif di Jawa Tengah*. Jakarta: LIPI Press.
- Sanusi, A. R. (2015). *Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.